

Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bungo

Hamirul¹⁾, Nanang Al Hidayat²⁾, dan Poiran³⁾

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

^{1,2,3}Jl.Setih Setio No 9 Kelurahan Pasir Putih 37215

E-mail: hrul@ymail.com¹⁾, nananghidayat108@yahoo.co.id²⁾, pioran88@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya volume sampah yang ada di kelurahan pasar, namun armada tidak bisa mengangkut sampah setiap harinya terutama didaerah perumahan masyarakat di dua kelurahan terutam di kelurahan pasir putih dan kelurahan batang bungo. Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuat Model rekomendasi MSN Approach Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di kabupaten bungo terutama di kelurahan pasir putih dan kelurahan batang bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian perubahan sikap, perilaku, dan tanggungjawab yang lebih baik dan positif dari stakeholders kebijakan dalam kategori Mentality Approach aspek fungsi dan struktur organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di setiap Kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan Rimbo Tengah dan Pasar sudah cukup baik dalam kategori System Approach Serta dalam aspek snergitas harus mampu membangun sinergitas dalam aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, sumberdaya manusia, data informasi dan strategi monev terhadap kebijakan dan program. Adapun dalam aspek simbiosis mutualisme harus didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Dari pendekatan ini dapat dianalisis bahwa pada aspek kemitraan strategis masih belum berjalan dengan baik pada aspek Networking Approach.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, MSN approach, Pengelolaan sampah, Kabupaten Bungo

MSN Approach Model in the Implementation of Waste Management Policy in Bungo District

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing volume of waste in the Market Village, where the waste collection fleet cannot transport waste daily, especially in residential areas of Pasir Putih Village and Batang Bungo Village. The aim of this study is to develop a recommendation model using the MSN (Mentality, System, Networking) approach for the implementation of waste management policies in Bungo Regency, with a focus on Pasir Putih Village and Batang Bungo Village. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. The findings indicate improvements in attitudes, behaviors, and responsibilities among policy stakeholders, categorized under the Mentality Approach. The organizational structure and functions related to implementing waste management policies across the Kelurahan in Rimbo Tengah and Market sub-districts were found to be relatively effective, falling under the System Approach. However, in terms of synergy, there is a need to enhance institutional collaboration, policy programs and budgeting, human resources, data management, and monitoring and evaluation strategies. For the symbiotic mutualism aspect, it is essential to base efforts on the principles of mutual need, mutual benefit, and mutual support. The Networking Approach analysis reveals that strategic partnerships in waste management are still not functioning effectively.

Keywords: Policy implementation, MSN approach, Waste management, Bungo Regency

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bungo angkut sampah ke TPA mencapai 60-65 ton per hari. Sampah itu agak kesulitan dibuang ke TPA bila hari hujan, karena ada beberapa titik jalan rusak dan harus antre untuk

sampai ke TPA Kecamatan Pasar Muara Bungo memiliki luas wilayah 9,21 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 21.526 jiwa (BPS, 2022). Timbulan sampah yang dihasilkan tiap kelurahan yakni Kelurahan Bungo Barat sebesar 1,1 ton/hari, Batang Bungo sebesar 1,97 ton/hari, Bungo Timur sebesar 1,082 to/hari, Jaya

Setia sebesar 2,23 ton/hari dan timbulan sampah di Kelurahan Tanjung Gedang sebesar 973 kg/hari. Perhitungan jumlah timbulan sampah dilakukan dengan teknik perhitungan menggunakan estimasi jumlah penduduk yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yakni 0,4kg/hari, sedangkan jumlah timbulan sampah Pasar Tradisional Kelurahan Batang Bungo diambil berdasarkan data Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yaitu sebesar 6,42 ton/hari. Sehingga dapat diketahui jumlah sampah perhari di Kecamatan Pasar Muara Bungo ialah 13,775 ton. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan di kecamatan ini ialah sampah permukiman DLH, 2022 dalam (Hariyanti, et al, 2022)

Fakta bawa setelah 11 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 08 Tahun 2012 ini ditetapkan, masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo dikejutkan dengan banjir yang melanda secara tiba tiba, dikarenakan peran serta masyarakat yang masih minim dalam pembuangan sampah pada tempatnya.

Pendekatan ini belum pernah ditemukan dalam kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dimana hasil penelitian tentang implementasi pengelolaan sampah masih menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Diantaranya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota (Afila et al., 2022), Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga (Angraini et al., 2024), Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado Standar Operasional Prosedur Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah berjalan dengan baik sehingga para pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami proses pengelolaan sampah (Mokodompis et al., 2019) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus bahwa Pemberian informasi melalui kegiatan sosialisasi merupakan bentuk upaya pemberian edukasi kepada masyarakat, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan daerah tersebut meningkat. Peningkatan pengetahuan yang terus menerus dapat berdampak kepada perubahan sikap dan praktik masyarakat (Chaerul et al., 2020). , Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe belum terlaksana secara optimal, karena, Komunikasi belum adanya sosialisasi langsung dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan larangan membuang sampah di sembarangan tempat, Sumber Daya, Fakta yang terlihat masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap, Disposisi Faktanya Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe sebagian besar sudah bekerja dan di tempatkan pada posisi yang sesuai dengan The right man in the right place, sehingga pekerjaan yang diamanahkan kepadanya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan, Struktur Birokrasi, Fakta yang terlihat bahwa masih belum adanya SOP

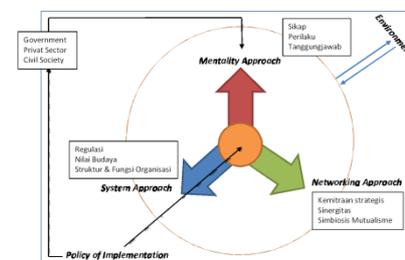
yang jelas dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengatur tentang tugas dan sistem kerja petugas lapangan di TPA Alue Lim. (Zahara et al., 2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam inovasi pengelolaan sampah terpadu di kota Mojokerto Tentang pengelolaan sampah sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari inovasi yang telah berhasil dilakukan dengan baik yaitu, Taman TPA Randegan merupakan inovasi yang sangat menarik karena selain tempat wisata keluarga juga dapat belajar bagaimana mengelola sampah yang baik, Inovasi pengelolaan sampah basah, mengelola sampah rumah tangga dan membaginya menjadi tiga macam hasil yaitu kompos, air lindi dan biogas. Hasil dari pengelolaan sampah sendiri dapat digunakan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, Inovasi pengelolaan sampah kering, mengelola sampah kering terdapat dua jenis penyalurannya yaitu melalui bank sampah induk dan recycle gallery. Dengan adanya bank sampah induk maka masyarakat dapat menabung sampah dan mendapatkan kesempatan menang undian umroh serta dapat menampung warga yang ingin menyalurkan kemampuan seninya di recycle gallery yang berisi karya-karya dari pengelolaan sampah kering. (Hamirul, 2017) , Analisis 3R dalam Pengelolaan sampah (Eprianti et al., 2021), Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan pelyanan kebersihan dikota Manado bahwa Karakteristik yang terjalin oleh dinas, kecamatan, maupun tenaga kerja sudah terlihat baik dalam pelaksanaannya hubungan-hubungan dan komunikasi dalam hal sosialisasi pun sering dipaparkan oleh pihak kecamatan maupun dinas untuk menjabarkan tujuan kebijakan terhadap masyarakat. (Muhammad, 2023), Implementasi pengelolaan sampah dikota Tarakan Faktor penghambat implementasi Pengelolaan Sampah (Studi Program Sampah Semesta di Kelurahan Karang Harapan Kota Tarakan) antara lain banyaknya medan yang rusak dan sulit untuk dilalui armada pengangkut sampah untuk program sampah semesta, kurang tersedianya gerobak roda 3 yang disediakan, kurang tersedianya transfer depo atau terminal sampah yang disediakan, mahalnya biaya operasional dan perawatan gerobak roda tiga dan jumlah pekerja yang tidak memadai untuk melaksanakan program Sampah Semesta ini. (Harapan & Tarakan, 2019), pengelolaan sampah daerah sepatan di kota Tangerang Kebijakan pengelolaan sampah di Sepatan Kabupaten Tangerang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Dalam pengelolaan sampah, kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Daerah, juga karena peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja hikmah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah dalam bidang pengelolaan dan kebersihan sampah, apakah dilaksanakan sesuai dengan landasan yuridis yang

digunakan yaitu dalam PP No 81 Tahun 2012 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sendiri bertumpu pada pengelolaan dan pengelolaan sampah. tertuang dalam pasal 10 ayat 1. Pasal 11 menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi: a. Batasan Timbulan Sampah b. Pendaaur ulang limbah; dan / atau c. Penggunaan kembali limbah. Dalam Pasal 16, penanganan sampah itu sendiri meliputi: a. Penyortiran; b. Koleksi; c. Angkutan; d. Pengolahan; dan e. Pengolahan limbah akhir. Bab II pasal 4 ayat 3 dalam PP No. 81/2012 mengamanatkan pemerintah kabupaten / kota merumuskan dan menetapkan kebijakan dan metode kabupaten / kota dalam pengelolaan sampah dalam hal pengurangan dan penanganan sampah tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip, tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, prinsip keselamatan, keamanan, dan nilai. (Di, 2008), dan Determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus dinilai sudah baik. Hal ini diindikasikan dengan tabel hasil rekapitulasi statistik deskriptif implementasi kebijakan pengelolaan sampah (Y) yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,3%) menyatakan baik, sehingga muncul angka rata-rata sebesar 3,11 dengan keterangan yaitu "baik" (WATI et al., 2020) dan hal tersebut di ikuti juga dengan sumbangsih dari perilaku masyarakat maupun perilaku dari agen pelaksananya, Mematuhi disiplin organisasi merupakan salah satu persyaratan yang mutlak ditaati oleh semua aparatur pemerintah dan Mematuhi disiplin organisasi merupakan salah satu persyaratan yang mutlak ditaati oleh semua aparatur pemerintah, kepatuhan pada disiplin organisasi menyangkut berbagai sisi seperti ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tepat waktu ditempat tugas, kepatuhan kepada atasan, bekerja berdasarkan kultur organisasi yang disepakati bersama, menjunjung tinggi etos kerja dan tidak berperilaku negatif. Setiap bentuk tindakan dari perilaku yang menyimpang dari hal-hal yang negatif dapat digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Perilaku pedagang durian musiman di pasar atas kabupaten Bungo Perilaku ada respon dari sebuah stimulus yang menghasilkan sikap dan tindakan, dimana pedagang duren musiman ini sebetulnya mempunyai pengetahuan tentang kebersihan terutama tentang kulit durian yang diletakkan dan dikumpulkan di sekitar wilayah berdagang mereka dan hal ini berakibat pada terkesan semerawutnya lingkungan terutama di jalan raya, namun hal ini dibiarkan oleh mereka karena tidak adanya reward dan punishment terhadap tindak tanduk yang mereka lakukan dan menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal yang biasa dan tidak melanggar. Dalam peraturan daerah sudah diatur mengenai pengelolaan sampah dan lain sebagainya, namun aturan yang ada ini tidak dijalankan dengan baik oleh pemangku kebijakan pada kondisi lapangan tidak ada tindakan tegas terhadap kondisi ini sehingga pedagang

durian musiman ini dengan se enaknya membuang sampah kulit durian disekitar pasar di wilayah yang sebetulnya untuk berdagang dan tidak adanya tindakan atau funishment mereka merasa tidak ada yang salah dengan yang mereka lakukan ("No Title," 2022) serta (Studi, Teknik, Teknik, & Bandung, 2020) Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang, Mengapa kebijakan pengelolaan sampah dikabupaten bungo belum berjalan dengan baik dari persepektif Model kebijakan MSN Approach?

2. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini, Model implementasi kebijakan publik yang digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Yulianto Kadji seorang guru besar bidang kebijakan publik dari Universitas Gorontalo. Model MSN approach implementasi kebijakan publik ini mengedepankan adanya jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang difokuskan pada tiga pendekatan utama, yakni meliputi mentality approach, system Approach, dan Networking Approach Kadji (Hariyanti et al., 2022), Secara terperinci untuk mentality approach diarahkan pada tiga indikator utama, yakni sikap, perilaku, dan tanggungjawab. Sedangkan system approach diarahkan pada tiga indikator utama, yakni sistem regulasi, sistem nilai budaya, dan sistem struktur dan fungsi organisasi. Adapun networking approach lebih diarahkan pada tiga indikator utama, yakni kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme. Gambaran ringkas model MSN approach dalam implementasi Kebijakan Publik dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model MSN Approach
Figure 1. MSN Approach Model

3. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo karena merupakan kawasan perkotaan yang padat penduduk dan merupakan pusat pasar tradisional. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga pendekatan utama, yakni mentality approach, system approach, dan networking approach. Informan yang dipilih adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bungo, Camat Pasa Muara Bungor, Lurah di wilayah Kecamatan Pasar Muara Bungo, Ketua bank sampah di 5 Kelurahan wilayah kecamatan Pasar Muara Bungo, dan masyarakat di wilayah kecamatan Pasar Muara Bungo. Pengumpulan

data menggunakan empat instrumen utama, yakni observasi, FGD, Wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis model interaktif (Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, 2021).

4. PEMBAHASAN

Berikut adalah pembahasan dari Model MSN Approach Implementasi Kebijakan Publik dalam penelitian ini, yaitu:

4.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bungo

1. Mentality Approach

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di lapangan ditemukan fakta bahwa perilaku, sikap, dan tanggungjawab dari pihak aparat pemerintah (DLH, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan) terkait pengelolaan sampah di kecamatan Rimbo tengah dan Kecamatan Pasar sudah mengarah pada sikap peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, perilaku yang bertanggungjawab dengan mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan, namun belum diterapkannya pengelolaan sampah dengan metode 3R (reduce, recycle, re-use). Sedangkan dari sisi warga ditemukan fakta yang beragam terkait diberlakukannya Perda pengelolaan sampah ini. Dimana para pengurus bank sampah yang tersebar di Kecamatan Rimbo tengah maupun kecamatan Pasar cukup antusias dalam menyambut adanya regulasi ini dengan intens berkoordinasi dengan DLH dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah masih sebatas kebersihan dilingkungan sekitar tempat tinggal dan belum menggunakan metode 3R (reduce, recycle, re-use) di Kecamatan Rimbo Tengah maupun Rimbo Tengah maupun di kecamatan Pasar. Begitu juga warga di sebagian RT di beberapa kelurahan juga antusias atas edukasi yang diberikan oleh pihak DLH dan pengurus bank sampah tersebut. Dalam hal ini masih ada sikap, perilaku dari sebagian masyarakat di beberapa kelurahan yang masih cuek dan acuh terhadap pentingnya pemilahan sampah. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya sampah organik dan an-organik yang dibuang jadi satu dalam satu kresek merah oleh warga di TPS masing-masing Kelurahan.

Realitas tersebut jika didialogkan dengan pendapatnya Kadji (Abror & Probojati, 2023) yang menyatakan bahwa mentality approach dalam implementasi kebijakan terwujud dalam perubahan sikap, perilaku, dan tanggungjawab yang lebih baik dan positif dari stakeholders kebijakan. Dari aspek ini dapat dianalisis bahwa pada aspek sikap spiritual sebenarnya baik dari pihak pemerintah dan masyarakat sudah menyadari akan pentingnya hidup bersih karena kepercayaan masyarakat bahwa hidup bersih itu sebagian dari iman. Namun dari aspek sikap sosial, dari sebagian warga masih menunjukkan sikap a-toleran dengan acuh terhadap edukasi yang diberikan oleh pihak pemerintah dan bank sampah dalam pengelolaan sampah. Hal ini

berdampak pada masih menumpuknya sampah di TPS yang kondisinya bercampur antara sampah organik dan sampah an-organik.

Bertolak belakangnya sikap dari dan masyarakat ini berimbas pada aspek perilaku. Dimana perilaku masyarakat yang masih gemar membuang sampah jadi satu tanpa memilah dahulu berdasarkan kategori sampah organik dan an-organik. Kondisi ini juga diperparah dengan petugas sampah yang hanya mengangkut sampah tersebut dari TPS ke TPA tanpa mengingatkan warga akan pentingnya memilah sampah dahulu. Meskipun dalam beberapa kesempatan pihak pemerintah dan bank sampah sudah menghimbau dan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya.

Terfragmentasinya perilaku pengelolaan sampah ini berakibat pada tanggungjawab yang harus dijalankan oleh stakeholders kebijakan ini. Dimana pihak pemerintah dalam hal ini DLH yang sudah menyediakan sarana bank sampah berdasarkan kategori sampah dan fasilitas pengolahan sampah yang tersedia di TPS maupun TPA kurang diimbangi dengan intensitas edukasi dan pembinaan secara berlanjut dari pihak kecamatan dan kelurahan terhadap warga. Sehingga beban tanggungjawab kebersihan lingkungan tertumpu pada keberadaan bank sampah yang harus memilah sampah tersebut di TPS. Sehingga sirkulasi pengelolaan sampah menjadi tidak berjalan lancar dan pengurangan timbunan sampah di TPA hanya berkurang sekitar 2%. Karena yang dipilah hanya terbatas pada sampah an-organik yang bernilai ekonomis

2. System Approach

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di lapangan ditemukan fakta bahwa dalam system approach implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar sudah cukup jelas dalam aspek regulasinya mengacu pada PERDA Kabupaten Bungo nomor 06 tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah. Dalam regulasi ini secara substansif mencerminkan adanya pengakomodiran terhadap kepentingan publik, mengugah partisipasi masyarakat dan meningkatkan produktivitas layanan public secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang berkaitan dengan nilai budaya hidup yang ada adalah nilai dan budaya Gotong royong dalam hal pola pembiayaan dimana masyarakatnya melakukan iuran yang dipungut dalam setiap bulannya yang diakomodir oleh tokoh masyarakat di setiap kelurahan yang tersebar di Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar. Sedangkan dalam aspek fungsi dan struktur organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di setiap Kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan Rimbo Tengah dan Pasar sudah cukup baik. Namun masih terfokus pada pemanfaatan sampah an-organik yang bernilai ekonomis, dimana masyarakat bisa menjual sampah tersebut ke bank sampah yang ada. Begitu juga masyarakat diajari membuat kreasi dari sampah an-organik tersebut guna meningkatkan nilai ekonomis sampah tersebut.

Realitas tersebut jika didialogkan dengan pendapatnya Kadji dalam yang menyatakan bahwa system approach dalam impelementasi kebijakan terwujud dalam system regulasi, nilai budaya dan fungsi & struktur organisasi dari stakeholders kebijakan ini. Dimana dalam system regulasi harus mengakomodir kepentingan publik, partisipasi publik, peningkatan produktivitas layanan publik. Sedangkan dalam aspek nilai budaya harus mencerminkan adanya kearifan lokal, kekerabatan, dan kegotongroyongan diantara stakeholders kebijakan. Adapun dalam aspek system struktur dan fungsi organisasi harus mencerminkan interaksi, interdependensi, dan integritas dari stakholders kebijakan. Dari aspek ini dapat dianalisis bahwa pada aspek system regulasi sudah memenuhi asas kepentingan dan pastisipasi publik serta peningkatan produktivitas layanan publik. Dimana dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 06 tahun 2015 secara eksplisit disebutkan bahwa Perda ini bertujuan untuk Pengelolaan sampah bertujuan: a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; b. meningkatkan kesehatan masyarakat; c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Hal ini tercermin dari terbentuknya Bank Sampah di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Rimbo tengah dan Kecamatan Pasar yang penamaan bank sampahnya menggambarkan ciri khas dan nilai luhur masing-masing kelurahan di wilayah kecamatan RimboTengah dan Kecamatan Pasar. Sedangkan secara structural, keanggotaan bank sampah juga menunjukkan adanya system kekerabatan dimana semua anggotanya adalah kader lingkungan yang merupakan warga asli masing-masing kelurahan. Kondisi ini mendorong para kader lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan masing-masing kelurahan dan sebagai sebuah kerabat/keluarga besar. Namun jika dianalisis dari aspek kegotongroyongan ternyata masih menimbulkan permasalahan. Dimana yang berperan aktif masih didominasi oleh pihak bank sampah. Sedangkan masyarakat hanya sebatas membayar iuran dan sebagian masih kurang proaktif bahkan cenderung acuh terhadap kebersamaan menjaga kebersihan lingkungan dengan tetap membuang sampah tanpa memilah dulu dari rumah masing-masing. Begitu juga dari pihak pemerintah dalam hal ini DLH masih sebatas menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah sesuai kategori sampah, sarana pengolah sampah, dan penyediaan TPS dan TPA.

Adapun dari aspek system struktur dan fungsi organisasi stakeholders kebijakan ini jika dianalisis sudah menunjukkan adanya interaksi, interdependensi dan integritas meskipun pada skala yang sangat terbatas. Dimana pada aspek interaksi antara masyarakat dan bank sampah sudah cukup baik namun belum terlaksananya dalam menerapkan pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Recycle, Reuse). Metode yang digunakan masih sebatas memilah dan memanfaatkan sampah an-

organik, sehingga timbulan sampah tidak banyak berkurang secara signifikan. Pemilahan tersebut juga masih didominasi oleh peran bank sampah yang melakukannya di TPS bukan dipilah langsung oleh warga dari sumbernya/rumah masing-masing. Sedangkan interaksi antara bank sampah dengan pihak pemerintah hanya sebatas koordinasi terkait pengesahan legalitas struktur organisasi bank sampah. Belum sampai pada pembinaan yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah terhadap eksistensi dan peran aktif bank sampah. Adapun interaksi antara pemerintah kelurahan, kecamatan dan DLH masih sebatas pada pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah baik berupa bak sampah, mesin pengolah sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Secara lebih jauh belum ada interaksi dan interdependensi serta integritas yang terbangun secara integratif, baik antar bank sampah yang tersebar di kelurahan di wilayah kecamatan nganjuk, antara bank sampah dengan pihak kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

3. Networking Approach

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di lapangan ditemukan fakta bahwa dalam networking approach implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar bahwa kemitraan strategis dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah terlihat pada adanya titik temu kepentingan antara pihak pemerintah kabupaten melalui DLH, pemerintah kecamatan melalui kelurahan-kelurahan yang ada dan masyarakat melalui keberadaan bank sampah yang tersebar di seluruh Desa.kelurahan di wilayah kecamatan Rimbo tengah dan kecamatan pasar. Namun kemitraan strategis tersebut belum menumbuhkan sinergitas yang baik dari semua pihak, karena terkesan masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga simbiosis mutualisme yang terbangun hanya terbatas pada bertemunya kepentingan antara warga masyarakat dan pihak bank sampah berkaitan dengan sampah an-organik yang bernilai ekonomis. Sedangkan sampah organik masih menjadi residu yang dibuang ke TPS dan berakhir di TPA.

Realitas tersebut jika didialogkan dengan pendapatnya Kadji dalam (Hariyanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa networking approach dalam impelementasi kebijakan seyogyanya mengedepankan terwujudnya kemitraan strategis, semangat sinergitas dan jejaring kerjasama antar stakeholder kebijakan publik, dimana dalam kemitraan strategis harus berpegang pada prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Sedangkan dalam aspek snergitas harus mampu membangun sinergitas dalam aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, sumberdaya manusia, data informasi dan strategi monev terhadap kebijakan dan program. Adapun dalam aspek simbiosis mutualisme harus didasarkan pada prinsip

saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Dari pendekatan ini dapat dianalisis bahwa pada aspek kemitraan strategis sudah terjalin antara DLH, pemerintah kecamatan melalui kelurahan-kelurahan yang ada dan masyarakat melalui keberadaan bank sampah yang tersebar di seluruh Desa.kelurahan di wilayah kecamatan Rimbo tengah dan kecamatan Pasar, meskipun prinsip-prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan diantara stakeholder kebijakan tersebut belum berjalan maksimal. Dimana belum ada kerjasama yang integratif antar bank sampah yang tersebar di kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar. Kerjasamanya masih bersifat parsial, yakni antara bank sampah dengan warga di setiap kelurahan dalam bentuk pemilahan sampah an-organik yang bernilai ekonomis, dan kerjasama antara bank sampah dengan pihak kelurahan, kecamatan dan DLH dalam bentuk legalitas kepengurusan bank sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Begitu juga dari aspek kesetaraan, peran pengelolaan sampah masih didominasi oleh masing-masing bank sampah di tiap kelurahan. Sedangkan pihak kelurahan dan kecamatan hanya berperan dalam hal legalitas bank sampah dengan menetapkan SK kepengurusan Bank Sampah di masing-masing Kelurahan Sedangkan dalam aspek sinergitas menunjukkan bahwa pada kelembagaan yang terlibat aktif hanya bank sampah di masing-masing kelurahan. Belum terwujudnya sinergitas kelembagaan yang integratif antara bank sampah unit, bank sampah induk, DLH, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat wilayah kecamatan Rimbo tengah dan Kecamatan Pasar menjadikan pengelolaan sampah masih dilakukan secara parsial di masing-masing desa/kelurahan. Hal ini berdampak pada kebijakan dan penganggaran program yang masih berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta legalisasi bank sampah yang sudah terbentuk di masing-masing desa/keluraha. Adapun anggaran dan program yang lebih mengarah pada pembinaan sumberdaya manusia masih belum optimal. Fakta ini mengakibatkan movev terhadap kebijakan dan program sampai saat ini masih didominasi monev administratif.

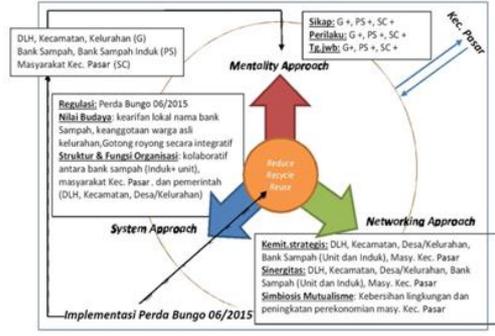
Sedangkan pada aspek simbiosis mutualisme sudah menunjukkan pemenuhan aspek saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung, meskipun masih sebatas pada simbiosis mutualisme antara bank sampah dan masyarakat dalam bentuk jual beli sampah an-organik yang dilakukan oleh kedua pihak.

4.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bungo

Dalam implementasi kebijakan Model MSN Approach Masih terdapat perilaku masyarakat yang acuh tak acuh dalam persoalan sampah, hal ini terbukti masih adanya masyarakat yang buang sampah sembarangan di jalan dan ini dilakukan oleh warga yang tidak tinggal dilingkungan sekitar dan hal ini juga diperparah oleh

agen pelaksana di tingkat lapangan yang masih belum tertib dalam hal mengambil sampah sehingga dilingkungan masih terdapat sampah yang berserakan di jalan.

Model yang terbangun dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar menunjukkan bahwa bahwa dari pendekatan mentalis sikap pemerintah (DLH, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan privat sector (bank sampah) menunjukkan perubahan yang positif, sedangkan sikap masyarakat ada yang positif dan negatif. Adapun perilaku privat sector (bank sampah) menunjukkan perubahan positif, sedangkan perilaku pemerintah (DLH, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan masyarakat ada yang positif dan negatif. Adapun tanggungjawab privat sector (bank sampah) menunjukkan perubahan positif, sedangkan tanggungjawab pemerintah (DLH, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan masyarakat ada yang positif dan negatif. Untuk pendekatan sistem menunjukkan bahwa regulasi yang digunakan sudah jelas yakni Perda Kabupaten Bungo 06 tahun 2015. Adapun nilai biudaya menunjukkan adanya nilai kearifan lokal pada penamaan bank sampah dan keanggotaan pengurus bank sampah menunjukkan nilai kekerabatan karena semua berasal dari warga asli masing-masing desa/kelurahan. Sedangkan struktur dan fungsi organisasi masih sebatas pengolahan sampah di TPS dan TPA. Untuk pendekatan jejaring kerjasam menunjukkan adanya kemitraan strategis antara pemerintah (DLH, Kecamatan, Desa/Kelurahan) privat sektor (bank sampah) dan masyarakat. Meskipun belum ada sinergitas dan simbiosis mutualisme yang maksimal. Dimana sinergitas hanya terbangun antara pihak bank sampah dan masyarakat dalam pemilahan sampah an-organik yang bernilai ekonomis. Secara ringkas model eksisting yang terbangun dapat dilihat pada gambar 2.

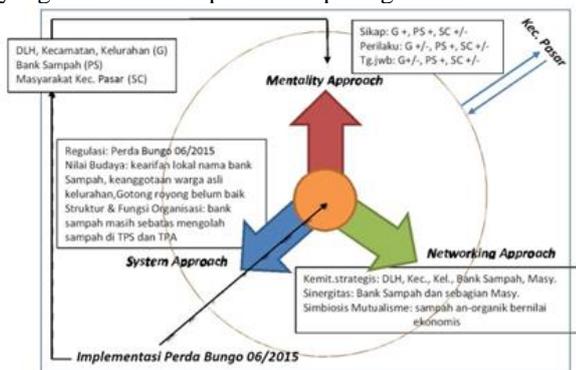


Gambar 2. Model eksisting Pengelolaan Sampah perpektif mentalis, sistem, dan jejaring kerjasama

Figure 2. Existing model of Waste Management from mentalist, system, and cooperation network perspectives

Dari model eksisting tersebut menunjukkan kurangnya perubahan positif dari aspek mentalitas, dan juga masih belum maksimalnya struktur dan fungsi dalam pendekatannya, serta kurang maksimalnya sinergitas dan simbiosis mutualisme diantara stakeholders kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

Maka perlu dibangun model rekomendasi MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah dengan mendorong perubahan yang lebih positif dan berkelanjutan dari aspek mentality approach dari stakeholders kebijakan. Begitu juga perlunya kolaborasi yang intensif dan integratif dalam aspek system approach guna menunjang optimalisasi struktur dan fungsi organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah ini. Pada aspek networking approach juga perlu memaksimalkan sinergitas dan simbiosis mutualisme diantara stakeholders guna mewujudkan kebersihan lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan Nganjuk. Secara ringkas model rekomendasi yang ditawarkan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Model rekomendasi MSN Approach Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Figure 3. MSN Approach recommendation model of Waste Management Policy Implementation

5. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bungo, khususnya di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Rimbo Tengah, telah menunjukkan beberapa perkembangan melalui penerapan MSN Approach yang mencakup Mentality Approach, System Approach, dan Networking Approach.

Sikap dan perilaku pemangku kebijakan mengalami perubahan positif, tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pemilahan sampah, sehingga implementasi metode seperti 3R (reduce, reuse, recycle) belum optimal. Regulasi sudah mendukung pengelolaan sampah, tetapi penerapan nilai gotong-royong dan struktur organisasi masih perlu ditingkatkan. Kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, dan bank sampah sudah terjalin, tetapi sinergitas dan kerja sama antar pihak belum maksimal.

Model eksisting menunjukkan masih adanya tantangan dalam perilaku masyarakat, keterbatasan struktur organisasi, dan kurangnya kolaborasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan model rekomendasi yang mendorong perubahan positif, kolaborasi intensif, dan sinergitas antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan kebijakan pengelolaan sampah.

6. SARAN

Sumber daya dana atau financial harus di tambahkan mengingat pembiayaan yang ada masih kurang, untuk fasilitas tempat pembuangan akhir yang sudah tidak layak pakai perlu pemeliharaan maupun armada yang baru.

Bagi pemerintah, terlebih khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Pengelolaan sampah di kabupaten Bungo sudah seharusnya di kelolah dengan teknologi persampahan terbaru atau modern.

Dinas Lingkungan Hidup bersama kecamatan harus tetap intens dalam melaksanakan kebijakan dan terus mengingatkan kepada setiap waraganya dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah. Dengan semakin pesatnya teknologi, pemerintah harus dapat memanfaatkannya seperti mensosialisasikan Bungo Bersih di Media Sosial.

Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah maupun pembayaran retribusi kebersihan. Dan masyarakat juga harus lebih menimbulkan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya serta saling menegur dan mengingatkan agar tercipta wilayah dan lingkungan yang bersih. Kesadaran masyarakat menjadi gerakan dari bawah yang sangat efektif. Oleh karena itu kesadaran masyarakat menjadi ujung tombak dalam penyelesaian masalah ini.

7. REFERENSI

- Abror, M. D., & Probojati, R. T. (2023). Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 148–157. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/6913>
- Angraini, S. S., Radjikan, R., & Hartono, S. (2024). IMPLEMENTASI PERBUP SIDOARJO NO 71 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA:(Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur). *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(03), 116-126.
- Afila, R., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 34-55.
- Chaerul, M., & Zatadini, S. U. (2020). Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara: Review. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 455-466.
- Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, S. M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 1.
- Eprianti, N., Himayarsi, N. D., Mujahid, I., & Srisusilawati, P. (2021). Analisis implementasi 3r

- pada pengelolaan sampah, 6, 179–184.
- Harapan, K., & Tarakan, K. (2019). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH, 7, 8605–8618.
- Hamirul, H. (2017). Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 14-18. Cahyadi, L. D. C. R., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2022). Digitalisasi Ukm Dengan Menggunakan Pendekatan Toe Model. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(09), 1132. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i09.p10>.
- Hariyanti, Y., Susanto, J., Alfarisi, I., Chotib, M., & ... (2022). Mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(2), 94–104. Retrieved from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/2717%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/2717/1218>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., Kasenda, V., & Sampah, P. (2019). Issn : 2337 - 5736, 3, 1–10.
- Muhammad, T. R. (2023). *Pengaruh Atmopser Toko, Kelengkapan Produk dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen Aciak Mart Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- WATI, N. R. Jika merasa lelah, maka ingatlah.. HAYYA ALAL FALAH. Arief, M. Y., & Afifa, U. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Tirta Sukses Perkasa Jember. *Valid Jurnal Ilmiah*, 17(1), 31–39.
- Zahara, A., Nirzalin, N., & Abubakar, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 1-10.